



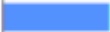
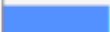
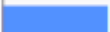
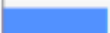
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah ketidaksetaraan gender menjadi fokus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengakui urgensi kesetaraan gender sebagai salah satu Sustainable Development Goals (SDGs) dari total 17 target pembangunan berkelanjutan. Ketidaksetaraan ini mencakup dominasi laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Norma sosial yang memihak pada laki-laki memperkuat kesenjangan dalam peluang dan akses, menghambat perkembangan perempuan dan memperkuat norma gender yang kaku. Kesetaraan gender bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga menghalangi kemajuan sosial dan ekonomi secara menyeluruh, sehingga menjadi prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan secara global. Sustainable Development Goals, termasuk Goal 5 yang menargetkan pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mencakup indikator seperti pendidikan untuk semua, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi dalam teknologi dan inovasi, untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami perempuan dan menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi semua individu.

Salah satu negara dengan tingkat ketimpangan gender yang tinggi adalah Arab Saudi. Dibuktikan dengan peringkat Arab Saudi di Global Gap Index yang hanya berada di 131 dari 146 negara (World Economic Forum, 2023).

| Rank | Country | Score | | Score change | Rank change |
|------|--------------|-------|---|--------------|-------------|
| | | 0-1 |  | 2022 | 2022 |
| 129 | Türkiye | 0.638 |  | -0.001 | -5 |
| 130 | Nigeria | 0.637 |  | -0.002 | -7 |
| 131 | Saudi Arabia | 0.637 |  | +0.001 | -4 |
| 132 | Lebanon | 0.628 |  | -0.015 | -13 |
| 133 | Qatar | 0.627 |  | +0.011 | +4 |

1 Peringkat Arab Saudi di Global Gap Index 2023

Meskipun Arab Saudi memiliki peran yang besar di dunia namun, Sebelum Raja Salman berkuasa, masalah kesetaraan gender di Arab Saudi belum menemukan solusi yang memadai. Tradisi patriarki memang sudah mengakar kuat di Arab Saudi, bahkan sebelum era Islam. Sistem ini menempatkan laki-laki dalam posisi superioritas, punya otoritas lebih besar dalam keluarga dan masyarakat. Akibatnya, ruang gerak perempuan Saudi lama sangat dibatasi, mulai dari pendidikan, kehidupan sosial, sampai ranah politik. Beberapa aturan negara pun memperkuat pembatasan ini. Seperti, Wanita di Arab Saudi masih memiliki keterbatasan dalam hal kebebasan, seperti larangan bepergian sendirian dan dilarang mengemudi mobil pada tahun 2011 (Antara, 2011).

Di dalam pendidikan Arab Saudi menggunakan kurikulum yang berbasis agama. Di dalam menentukan program studi, Arab Saudi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Para laki-laki hanya boleh memilih program studi sesuai dengan peran mereka seperti ilmu sains dan teknologi, sedangkan perempuan diperbolehkan hanya mengambil program studi yang berkaitan dengan ilmu keguruan, sastra, dan kesehatan (Aulia, 2006).

Arab Saudi juga memiliki perkembangan menurut data *Global Gender Gap Report* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*. Pada data pada tahun 2017 Arab Saudi menempati peringkat 138 dari 144 negara yang tercatat. Pada data terbaru di 2023, Arab Saudi menempati

peringkat 131 dari 146 negara (World Economic Forum, 2023). Arab Saudi naik tujuh peringkat hanya dalam selisih enam tahun. Pada tahun 2018, negara ini juga terpilih sebagai anggota baru Dewan Eksekutif PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Arab Saudi memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesetaraan gender, dan hal ini diwujudkan dengan adanya program Arab Vision 2030. Arab Vision 2030, diluncurkan pada tahun 2016 oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, merupakan program transformasi ambisius yang bertujuan mendiversifikasi ekonomi negara tersebut dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Visi ini berfokus pada tiga pilar utama: membangun ekonomi yang dinamis dan berkembang, menciptakan masyarakat yang bersemangat dan hidup, serta membangun bangsa yang tangguh dan terdepan (Saudi Vision 2030, 2023).

Saudi Vision 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki hubungan yang erat dalam bidang kesetaraan gender. Arab Saudi telah memulai sejumlah reformasi dalam beberapa tahun terakhir untuk mencapai kesetaraan gender, seperti memberikan hak mengemudi kepada perempuan dan memperluas akses perempuan ke sektor pekerjaan tertentu. Semua ini sesuai dengan tujuan-tujuan Saudi Vision 2030 yang mencakup transformasi ekonomi, sosial, dan budaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender menjadi bagian dari upaya ini menuju visi transformasi yang lebih besar untuk masa depan Arab Saudi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bagaimana kondisi ketidaksetaraan di Arab Saudi. Menurut Mai Mohammed H Alharbi dalam jurnal *International Journal of Islamic Thought* yang berjudul *Kingdom Vision 2030 and the Women's Empowerment in Saudi Arabia: An Empirical Investigation* Pentingnya peran perempuan dalam kehidupan praktis di Arab Saudi ditekankan oleh Saudi Vision 2030. Perempuan Saudi telah mengalami kemajuan dalam mendapatkan hak dan kebebasan yang mereka impikan melalui upaya di bidang budaya, pendidikan, pekerjaan, dan penghapusan segala bentuk ketergantungan dan

keterikatan perempuan secara sosial, ekonomi, dan politik (ALHARBI, 2022). Kini, pandangan terhadap perempuan Arab Saudi telah berubah dari hanya sebagai penerus nilai-nilai tradisional namun menjadi aktor dalam membangun bangsa

Selain itu, Siti Rohmah Soekarba dalam jurnal *Advances in Social Science Education and Humanities Research* yang berjudul *Determinant of Patriarchy in the Middle East: Hope for the 2030 Vision in a New Saudi Arabia*, Arab Saudi sangat menekankan budaya Arab dan atribut peran yang bersifat maskulin. Masyarakat yang bersifat maskulin menetapkan peran secara kaku, di mana pria dan wanita diharapkan melakukan tugas-tugas berdasarkan jenis kelamin mereka. Dalam penelitian ini, maskulinitas dapat dijelaskan sebagai penerapan perbedaan gender yang sangat ketat, di mana sifat-sifat pria seperti ketegasan, kekuasaan, kontrol, dan pencapaian mendominasi dan menguasai masyarakat tersebut (Soekarba, 2019).

Dari dua tinjauan literasi diatas terdapat gap penelitian yang belum mengaitkan upaya Arab Saudi mengatasi ketidaksetaraan gender dengan Sustainable Development Goals ke lima yaitu kesetaraan gender melalui Saudi Vision 2030.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang dan teori yang mendukung diatas, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Arab Saudi mewujudkan kesetaraan gender dalam tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Program Arab Vision 2030?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan guna memenuhi tuntutan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur. Pemaparan tujuan secara khusus akan dilanjutkan di sub-bab berikutnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara Khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam mencapai kesetaraan gender, mengevaluasi sejauh mana langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Arab Saudi dalam mencapai kesetaraan gender, serta menganalisis dampak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap masyarakat Arab Saudi untuk mencapai kesetaraan gender.

1.4 Kerangka Teori

1. Gender Inequality

Menurut Amartya Sen, Gender inequality adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang, kesehatan, partisipasi politik, dan kekerasan yang dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam masyarakat, yang memerlukan perubahan sosial dan kebijakan untuk memastikan kesetaraan (Fatahillah, Anwar, & Wahab, 2023).

Gender inequality, atau ketidaksetaraan gender, merujuk pada ketidaksetaraan yang dialami oleh individu berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka. Isu ini muncul karena adanya perbedaan perlakuan, hak, dan peluang antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan hak-hak reproduksi. Ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki dalam

institusi-institusi sosial, seperti politik, ekonomi, dan agama, sering kali memperkuat diskriminasi gender (Pahlevi & Rahim, 2023).

Talcott Parsons, seorang sosiolog terkenal, mengemukakan pandangan tentang ketidaksetaraan gender yang mencerminkan struktur fungsionalis dalam masyarakat. Menurut Parsons, ketidaksetaraan gender muncul dari peran sosial yang berbeda antara pria dan wanita dalam keluarga. Ia berpendapat bahwa dalam keluarga tradisional, pria memiliki peran instrumental yang berfokus pada pencarian nafkah dan perlindungan, sementara wanita memiliki peran eksplisit yang terfokus pada perawatan rumah tangga dan perawatan anak. Parsons percaya bahwa perbedaan ini adalah refleksi dari fungsionalitas sosial, di mana pembagian kerja ini mendukung stabilitas dan keharmonisan keluarga serta fungsi sosial secara keseluruhan. (Marzuki, 2007).

Menurut Amartya Sen, gender equality dapat diatasi untuk mencapai gender equality dengan pendidikan yang merata tidak memandang perempuan dan laki-laki, akses yang sama antara laki-laki dan perempuan terhadap layanan kesehatan, partisipasi politik yang merata terhadap suatu pemerintahan, dan akses yang merata terhadap kesempatan kerja yang sama dan upah yang adil (Hicks, 2002)

2. Rezim Internasional

Rezim internasional merupakan cara kerja yang mengatur perilaku negara dan aktor-aktor internasional dalam hubungan internasional. Menurut David A. Baldwin, rezim internasional adalah serangkaian aturan, norma, dan prosedur yang membentuk pola perilaku antara aktor-aktor internasional di suatu area kebijakan tertentu. Baldwin menekankan bahwa rezim menciptakan pola interaksi yang stabil dan dapat diandalkan antara negara-negara, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi di antara mereka (Keohane & Nye, 2007).

Menurut Alexander Wendt, rezim internasional adalah struktur sosial yang terbentuk melalui interaksi antara negara-negara dalam sistem internasional. Wendt menekankan bahwa

identitas, persepsi, dan hubungan antaraktor adalah faktor kunci dalam membentuk rezim internasional. Dia mengatakan bahwa negara-negara dalam sistem internasional membentuk persepsi bersama tentang norma-norma, aturan, dan ekspektasi yang mengatur perilaku mereka. Berdasarkan interaksi ini, negara-negara dapat membentuk rezim-rezim internasional yang menentukan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Wendt juga menyoroti pentingnya konstruksi sosial dalam menentukan dinamika hubungan internasional, menekankan bahwa identitas dan norma yang berubah dapat membentuk perubahan dalam rezim internasional (Wendt, 2000).

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Prayuda, Harto, & Gunawan, 2019).

Menurut Krasner, rezim yang berorientasi pada negara dan memberikan hak otoritas secara nasional kecenderungan mampu mengurangi ketidaksetaraan dalam pendistribusian sumber daya antar negara, namun belum mampu mengurangi ketidaksetaraan secara domestik. Sementara, rezim yang memberikan hak milik kepada otoritas global memungkinkan pendistribusian sumber daya yang lebih merata baik antar negara maupun internal negara. Krasner juga menjelaskan bahwa aturan dalam rezim internasional harus dalam salah satu bentuk antara lain melarang, mengharuskan, atau mengizinkan beberapa tindakan agar dianggap sebagai aturan (RAHMAT, 2022).

Krasner juga menjelaskan *Decision-making procedures* yang menggunakan mekanisme, monitoring, sanksi-sanksi dan resolusi dari penerapan prosedural dan program dalam suatu rezim. Rezim internasional menurut Krasner melibatkan interaksi antar aktor dari spesifik isu atau masalah yang dihadapi bersama. Krasner menilai interaksi aktor yang bertemu

dan sepakat untuk menjalankan prinsip, norma, aturan dan cara-cara demi mencapai kepentingan bersama (RAHMAT, 2022).

Melalui penjelasan dari Krasner diatas mengenai ciri-ciri rezim internasional, terbukti jika *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan bagian dari rezim internasional. *Sustainable Development Goals* dibentuk oleh PBB yang terkait dengan norma dan aktor-aktor dengan kepatuhan dan kesepakatan bersama. SDGs dapat mengatur perilaku negara sebagai aktor yang sepakat untuk menggunakan SDGs sebagai acuan kebijakan yang berlaku di negaranya

3. Gender Equality

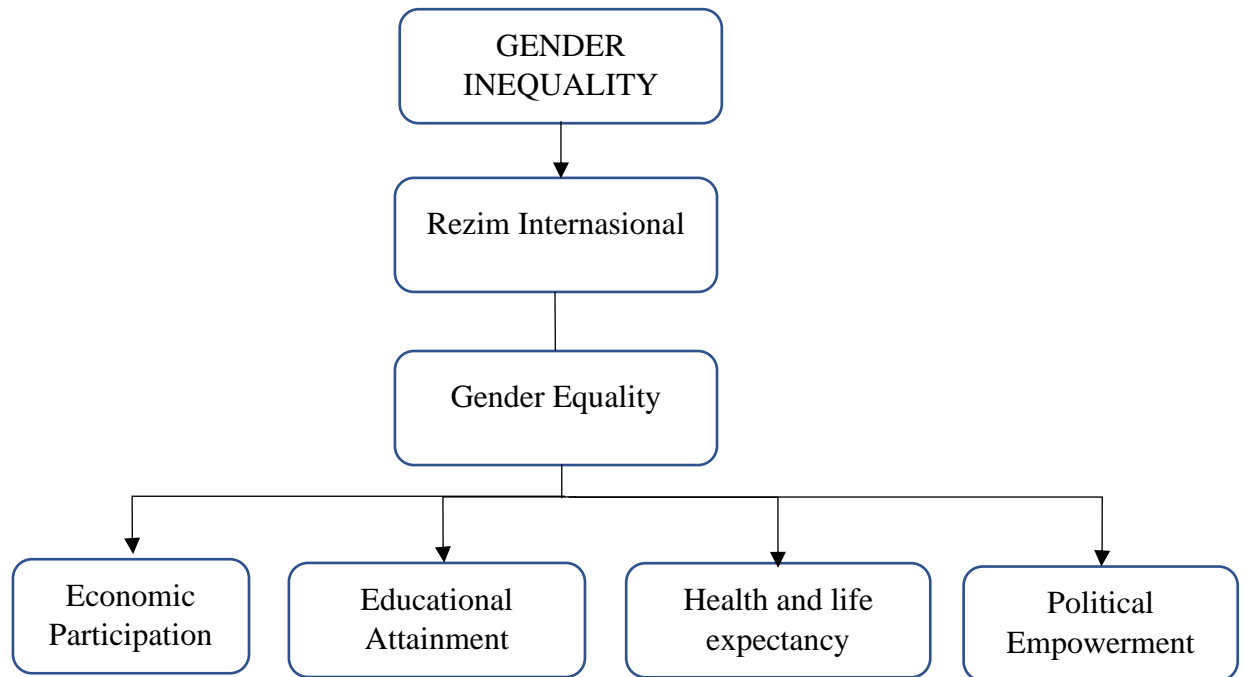
Mary Wollstonecraft, seorang feminis awal abad ke-18, menyampaikan pandangan penting mengenai kesetaraan gender dalam karyanya yang terkenal, "A Vindication of the Rights of Woman" (1792). Menurut Wollstonecraft, kesetaraan gender merupakan prinsip moral dan politik yang mendasar, yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan pria untuk mendapatkan pendidikan, partisipasi politik, dan peluang dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Wollstonecraft menentang pandangan patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi inferior dan mengklaim bahwa hanya melalui pendidikan yang setara dan kesempatan yang sama, perempuan dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan berkontribusi secara positif pada masyarakat (Ilaa, 2021).

Kesetaraan gender, menurut Amartya Sen, merangkum empat dimensi utama yang saling terkait dalam pencapaian kesetaraan sejati di masyarakat. Dua di antaranya mencakup aspek ekonomi dan pendidikan. Dalam dimensi ekonomi, laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, memulai usaha, dan mengakses sumber daya ekonomi lainnya. Ini berarti bahwa mereka harus bebas dari diskriminasi di pasar kerja, memiliki akses ke modal dan kredit, dan memiliki hak untuk

memiliki properti. Sementara itu, kesetaraan dalam pendidikan yaitu laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki akses yang sama terhadap sekolah, universitas, dan program pelatihan. Ini melibatkan penghapusan hambatan-hambatan seperti pengucilan dari lembaga pendidikan atau kurikulum yang tidak mendukung pertumbuhan setara bagi semua gender (Hicks, 2002).

Di sisi lain, kesetaraan gender juga mencakup aspek kesehatan dan kehidupan, serta pemberdayaan politik. Dalam hal kesehatan dan kehidupan, laki-laki dan perempuan harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi, layanan kesehatan ibu dan anak, dan layanan kesehatan mental. Ini berarti bahwa mereka harus mampu membayar layanan kesehatan, dan memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas dan profesional kesehatan yang terlatih. Selain itu, penting juga untuk mengurangi kesenjangan dalam harapan hidup antara perempuan dan laki-laki. Sementara itu, kesetaraan politik melibatkan memberikan perempuan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan pemberdayaan mereka dalam kegiatan politik dan sosial. Laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk diwakili dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih untuk jabatan politik. (Hicks, 2002).

1.5 Sintesa Pemikiran



1.6 Argumen Utama

Saudi Vision 2030 memiliki program untuk mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks partisipasi ekonomi, program seperti Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Inovasi telah diluncurkan untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi. Di sektor pendidikan, fokus diberikan pada pengembangan kurikulum yang memperkuat peran perempuan dalam masyarakat serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi mereka. Selain itu, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan ke layanan kesehatan yang berkualitas dan memperpanjang harapan hidup mereka. Dalam pemberdayaan politik, langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, melalui program pelatihan politik khusus dan peningkatan representasi perempuan dalam lembaga politik. Langkah-langkah ini mendukung pencapaian Sustainable Development

Goals, khususnya Goal 5 yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam agenda pembangunan berkelanjutan secara global.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara umum kata deskriptif berarti menggambarkan suatu fenomena. Dalam prosesnya, penelitian dilakukan dengan cara mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui kondisi yang terjadi baik sekarang ataupun sebelumnya dengan mengaitkan variabel-variabel yang ada (Mardalis, 2006). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan upaya Arab Saudi mencapai Sustainable Development Goals 5 melalui program Saudi Vision 2030.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Raja Salman mengenai kesetaraan perempuan yang mulai menjadi Raja Arab Saudi pada tahun 2015 awal mula Saudi Vision 2030 dimulai sampai dengan 2023 data terbaru yang tersedia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai sumber data utama. Sumber data yang digunakan oleh peneliti mencakup berbagai jenis, seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, dan bahan dari internet. Data yang diperoleh dari sumber-sumber ini mendukung analisis penelitian terkait dengan reformasi hak-

hak perempuan di Arab Saudi yang terkait dengan kebijakan Arab Saudi ketika di pimpin oleh Raja Salman dari tahun 2015 hingga 2023

Sumber data yang digunakan peneliti mencakup buku-buku dengan tema yang relevan dengan penelitian ini, yang memberikan konteks dan landasan teoritis yang diperlukan. Selain itu, artikel jurnal ilmiah dan situs web resmi menjadi sumber data tambahan yang memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu terkait dengan reformasi hak-hak perempuan di Arab Saudi. Peneliti juga mengandalkan situs berita online yang kredibel dan terpercaya sebagai sumber data penunjang penelitian ini. Sumber-sumber berita online ini dapat memberikan informasi tentang perkembangan terbaru terkait dengan perkembangan kebijakan Arab Saudi mengenai kesetaraan perempuan dan dampaknya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan jenis penelitian yang bertitik pada pengumpulan data maupun teknik analisis data yang dalam prosesnya tidak menggunakan langkah statistika maupun cara-cara mempertega data dengan menggunakan proses numerik (Lamont, 2015). Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data perkembangan kesetaraan gender di Arab Saudi, mereduksi data, melakukan pembahasan serta memberikan kesimpulan diakhir.

Sistematika Penulisan

Dalam kaidah penelitian ilmiah, dengan tujuan memberikan pemahaman yang terarah, fokus substansi studi penelitian ini diorganisir menjadi 4 (empat) bab, antara lain :

BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, sintesa pemikiran, argumen utama, sampai metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisikan penjelasan mengenai upaya Arab Saudi mewujudkan gender equality melalui Economic Participation dan Educational Attainment

Bab III berisikan penjelasan mengenai upaya Arab Saudi mewujudkan gender equality melalui Health and life expectancy dan Political Empowerment

Bab IV berisikan kesimpulan dari BAB I hingga BAB III